

Analisis Pendapatan Asli Desa Setelah Penetapan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

I Putu Fery Karyada

Program Studi Akuntansi
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar, Indonesia

email: karyada_fery@unhi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkembangan pendapatan asli desa di Tabanan. Subyek penelitian adalah 133 desa di 10 kecamatan dengan objek jumlah pendapatan asli desa tahun 2016, 2017 dan 2018. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kemudian disajikan menggunakan tabel dan grafik. Hasil penelitian menyatakan desa di Kecamatan Pupuan dan Penebel memiliki perkembangan pendapatan asli desa yang positif yaitu terjadi peningkatan pada tahun 2018. Sedangkan untuk delapan kecamatan yang lain mengalami stagnansi dan cenderung penurunan. Salah satu faktor penyebab kecilnya jumlah pendapatan asli desa adalah tidak memiliki basis ekonomi kuat yang dikelola oleh pemerintah desa. Dana desa tidak mampu dikelola secara baik untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Kata Kunci: dana desa, pendapatan asli desa, pupuan, penebel

Abstract

This study analyzes the development of village income in Tabanan. The research subjects were 133 villages in 10 sub-districts with the object of village income in 2016, 2017 and 2018. Data were analyzed using a descriptive then presented using tables and graphs. The results revealed villages in Pupuan and Penebel had a positive income, that is an increase in 2018. Whereas for the other sub-districts experiencing stagnation tends to decrease. One factor causing is the do not have strong economic base managed by the village government. Dana Desa cannot be managed properly to increase the village's income.

Keywords: *village fund, village income, pupuan, penebel*

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya otonomi daerah ternyata masih belum dirasakan oleh lapisan masyarakat terbawah yaitu tingkat desa. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan fokus kebijakan terhenti di tingkat Kabupaten. Selain itu, lemahnya kapasitas demokrasi menurunkan kualitas pemerintahannya (Widodo, 2017).

Pada Bulan September 2014 *Gini Ratio* di pedesaan hampir menyentuh angka tertinggi yaitu sebesar 0,336 (Badan Pusat Statistik, 2017) menjelaskan masih terjadinya kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah pedesaan. Maka dari itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sekarang dikenal dengan nama UU Desa.

UU Desa digunakan pedoman membentuk desa mandiri secara politik dan ekonomi. Peraturan tersebut memberikan tambahan pendanaan hingga 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat dana sebesar 800 juta setiap tahunnya (Kementerian Keuangan, 2018). Banyaknya dana harus dikelola secara maksimal agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Program ini dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa menggunakan pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal. Tujuannya adalah untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk kedaulatan ekonomi yaitu kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada di dalamnya (Kurniawan, 2015:15). Untuk mewujudkannya maka setiap desa harus dapat meningkatkan pendapatan aslinya. Pendapatan asli desa merupakan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Sampai tahun 2019, belum terlihat jelas dari dampak pemanfaatan dana desa untuk perekonomian masyarakat. Bali merupakan wilayah dengan karakteristik desa yang memiliki potensi agraris dan pariwisata. Namun, masih banyak desa belum memanfaatkan potensinya dengan baik. Berdasarkan survey Indeks Pembangunan Desa, dari 636 desa sebanyak 460 desa (72,33 persen) masih termasuk dalam kategori desa berkembang (Badan Pusat Statistik, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Bali, telah terdapat desa yang memiliki pendapatan asli tinggi namun masih ada desa yang belum memiliki sumber pendapatan asli dari kewenangan desa. Belum adanya pemetaan secara jelas pendapatan asli desa memotivasi penulis mengkajinya di kabupaten tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Bali. Hasil penelitian ini dapat dijadikan deskripsi awal tentang perkembangan pendapatan asli desa setelah penerbitan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis

data dengan cara statistik deskriptif yang hanya mendeskripsikan data tanpa bermaksud melakukan generalisasi (Sugiyono, 2014). Penelitian mendeskripsikan jumlah pendapatan asli desa di Tabanan selama tiga tahun yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018. Subyek penelitian adalah 133 desa di 10 kecamatan

dengan objek jumlah pendapatan asli desa per tahun. Deskripsi data menggunakan tabel dan grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan penelitian ini adalah Desa di Kabupaten Tabanan. Adapun rincian jumlah desa dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Subyek Penelitian

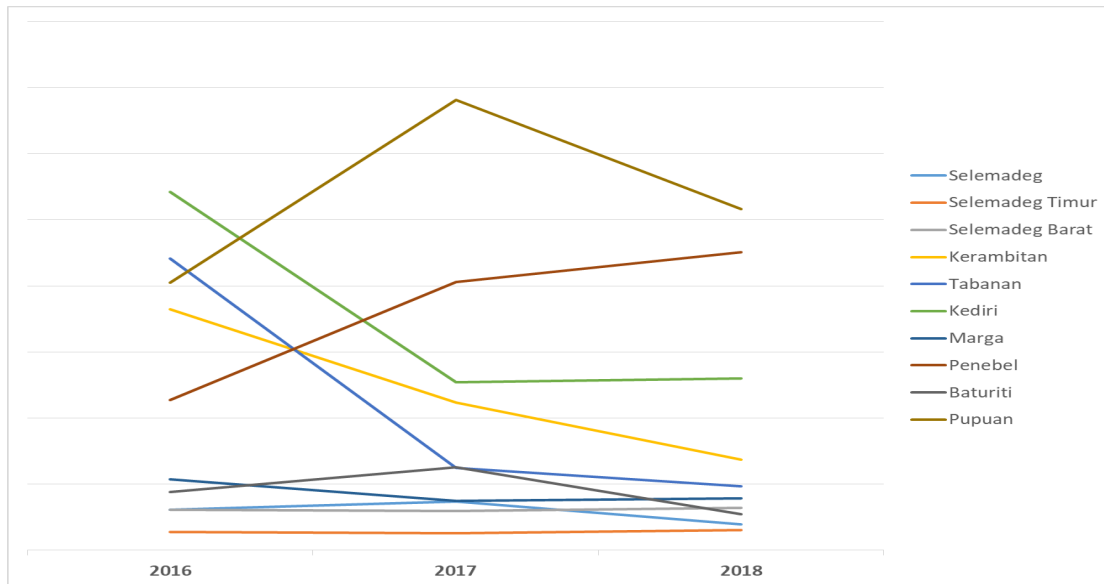
No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Selemadeg	10
2	Selemadeg Timur	10
3	Selemadeg Barat	11
4	Kerambitan	15
5	Tabanan	12
6	Kediri	15
7	Marga	16
8	Penebel	18
9	Baturiti	12
10	Pupuan	14

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Bali

Total subyek penelitian ini adalah 133 desa dari 10 kecamatan di Tabanan. Dari total desa, kemudian dikaji jumlah pendapatan asli desa tahun 2016, 2017, dan 2018. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Bali. Terdapat beberapa PADes yang belum masuk database provinsi, sehingga dilakukan juga survey ke desa.

Setelah pengolahan data, kemudian ditampilkan dalam gambar grafik berikut.



Gambar 1. Tren PADes Desa di Tabanan

Berdasarkan gambar 1, kecamatan pupuan memiliki jumlah PADes tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Terjadi peningkatan tahun 2018 dibandingkan dengan 2016. Kondisi ini dikarenakan selain jumlah persawahan yang luas seperti di Desa Belimbing, desa di kecamatan pupuan juga mampu mengelola potensi wilayahnya seperti produk kopi di Desa Pujungan, Munduk Temu dan Kakao di Desa Jelijih Punggang. Dengan bantuan Dana Desa, mereka mampu mengelola perekonomiannya dengan baik.

Kecamatan dengan jumlah PADes tinggi juga diperoleh di kecamatan Penebel. Tingginya PADes di kecamatan ini ditopang oleh potensi ternak ayam ras di Desa Babahan dan pariwisata di Jatiluwih. Berdasarkan wawancara dengan Camat Penebel, Dana desa telah dimanfaatkan untuk pengembangan potensi tersebut.

Berbeda dengan dua kecamatan tersebut, wilayah yang lainnya tidak terlalu mengalami perubahan jumlah PADes dan bahkan cenderung menurun. Salah satu faktor penyebab kecilnya jumlah PADes adalah tidak adanya basis ekonomi kuat yang dikelola oleh pemerintah desa. Dana desa tidak mampu dikelola secara baik untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kesempatan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui badan usaha. Peraturan tersebut mendorong setiap desa wajib mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu meningkatkan PADes (Suryanto, 2018). Agar efektif, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar pihak desa dan BUMDes (Saputra et al., 2019).

Potensi desa memiliki dimensi yang luas dan tidak mungkin sama dengan wilayah lain. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola potensinya yaitu pertama, memetakan bentang alam yaitu membuat peta desa dengan memberikan simbol untuk penanda setiap tempat. Landscape desa pada umumnya memiliki banyak potensi yang mudah untuk

diamati seperti potensi pertanian, wisata, potensi bahan baku, potensi air dan udara bersih.

Kedua, memetakan bentang sosial yaitu mengkaji informasi akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk yang telah dihasilkan warga setempat. Ketiga, memetakan bentang ekonomi. Semua desa pada dasarnya memiliki potensi sumber daya yang besar namun hanya menjadi penonton dan eksploitasi pemasaran produk-produk dari kota. Seluruh kebutuhan dapat dijadikan potensi ekonomi untuk dimanfaatkan secara internal. Penggunaan dana desa seharusnya fokus pada program kemiskinan, pengangguran, peningkatan pendidikan dan keterampilan (Abidin, 2015; Heijman, W., Hagelaar, G., & van der Heide, 2019). Desa juga dapat mengembangkan pariwisata, *geotourism*, pertanian, dan souvenir (Farsani et al., 2011; Suriya, 2010).

Keempat, memetakan bentang teknologi. Sumber daya alam, manusia, dan budaya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan adanya ide kreatif dan teknologi. Munculnya ide kreatif harus melewati observasi dan pengalaman oleh masyarakatnya. Semakin banyak warga desa berinteraksi dengan berbagai kalangan maka pikirannya akan semakin terbuka. Warga desa yang keluar dari desa akan membawa sudut pandang dan pengalaman baru untuk desanya. Perlu adanya fasilitasi jaringan internet agar dapat membentuk unit bisnis baru (Kandilov & Renkow, 2010).

Kelima, memetakan bentang manusia. Aktivitas manusia merupakan modal sosial untuk perekonomian desa. Modal sosial adalah cara masyarakat menyelesaikan masalah menggunakan jejaring, pengetahuan dan kreatifitas. Masyarakat yang telah terbiasa melaksanakan kegiatan kolektif dan memiliki kesadaran untuk berkorban, maka dapat menjadi modal penting kesuksesan desa. Diperlukan pula investasi pada pendidikan dalam pengurangan kemiskinan agar

masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya (Otsuka, 2002).

Hasil penelitian ini menjelaskan kondisi desa di Tabanan masih dalam kondisi yang belum optimal. Berdasarkan tren pendapatan desa, tidak banyak mengalami perubahan. Perlu adanya pendekatan khusus dalam pengelolaan dana desa agar dapat menuju desa yang maju dan mandiri secara ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa desa di Kecamatan Pupuan dan Penebel memiliki trend pendapatan asli desa positif sedangkan sisanya stagnan dan cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan dana desa belum mampu dimanfaatkan secara maksimal dalam memanfaatkan potensi desa yang dimiliki.

Penelitian ini hanya memberikan deskripsi awal tentang perkembangan pendapatan asli desa sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih komprehensif tentang pendapatan asli desa dengan pendekatan kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Berita Resmi Statistik No.15/02/Th.XX*.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Desa 2018. website: www.bps.go.id
- Farsani, N. T., Coelho, C., & Costa, C. (2011). Geotourism and geoparks as novel strategies for socio-economic development in rural areas. *International Journal of Tourism Research*, 13(1), 68–81. <https://doi.org/10.1002/jtr.800>
- Heijman, W., Hagelaar, G., & van der Heide, M. (2019). Rural resilience as a new

- development concept. *EU Bioeconomy Economics and Policies*, 2, 195–211.
- Kandilov, I. T., & Renkow, M. (2010). Infrastructure Investment and rural economic development: An Evaluation Of USDA's broadband loan program. *Growth and Change*, 41(2), 165–191. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2010.00524.x>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Buku II Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2018*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6665/nota-keuangan-apbn-2018-rev.pdf>.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Otsuka, K. (2002). Poverty reduction issues: Village economy perspective. *Asian Development Review*, 19(1), 98–116.
- Renkow, M. (2003). Employment growth, worker mobility, and rural economic development. *American Journal of Agricultural Economics*, 85(2), 503–513. <https://doi.org/10.1111/1467-8276.00137>
- Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suriya, K. (2010). Impact of community-based tourism in a village rconomy in Thailand: An analysis with VCGE model. *EcoMod2010 Conference*.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDEs Sukses*. PT. Syncore Indonesia.
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8487>